

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang yang terkait dengan urusan masing-masing perangkat daerah dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan,



mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2024, disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Palu. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Palu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Palu tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu. Disamping itu, Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Palu tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan khususnya pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Walikota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah.

Penyusunan Dokumen Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki tujuan dan peran yang sangat penting dalam mengevaluasi



pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu, perkiraan capaian tahun berjalan serta mengukur pencapaian target Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, serta sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Perangkat Daerah (PD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Palu tahun 2024, disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu



Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

25. Peraturan Walikota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan;

26. Peraturan Walikota Kota Palu nomor 23 Tahun 2017 tentang tugas, fungsi dan tata kerja dinas pertanian dan ketahanan pangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil / aparat dinas dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas pembangunan pertanian di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Perikanan, dan Bidang Penyuluhan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan di tahun 2024 dapat tercapai;
2. Mempermudah kontrol, koordinasi, analisa, *monitoring* dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku-pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan di sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan;
4. Menjadikan kerangka dasar bagi Pemerintah Daerah pada umumnya dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan di Sektor Tanaman Pangan,



Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ;

5. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPJMD Kota Palu dengan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu;

Adapun tujuan dari disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2024 adalah :

1. Acuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu dalam mengoperasikan RKPD Kota Palu Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Palu.
2. Sebagai dasar dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan dalam arti luas pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu selama tahun 2024.
3. Acuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu terhadap target pencapaian yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu tahun 2024 ini disusun berdasarkan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan`



BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALU

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALU

BAB V PENUTUP



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA
PALU TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun Lalu dan Capaian Renstra.

Untuk memastikan kesinambungan serta kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2023), serta dihubungkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun sebelumnya. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Palu dalam melaksanakan Rencana Kerja sesuai target kinerja dalam Rencana Strategis serta menemu kenali hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam menyusun Rencana Kerja 2024, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 menjadi salah satu input penting untuk merencanakan program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tahun 2022 merupakan periode awal dalam pelaksanaan Misi Pemerintah Kota Palu yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun (periode RPJMD tahun 2021-2026), yaitu Misi 1 “Membangun perekonomian yang **mandiri** dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global”, yang dituangkan dalam Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, dapat diuraikan capaian kinerja dari indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

- Pada sasaran strategis Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel Capaian Indikator Nilai Evaluasi Sakip sesuai dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2022 yaitu BB.



- Sasaran Strategis Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan dengan capaian : kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB 93,41 %, produktivitas pertanian perhektar pertahun 82,05 %, persentase penurunan kejadian dan jumlah penyakit hewan menular 166,90 %, jumlah total produksi perikanan 167 %,
- Sasaran Strategis Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat kota Palu : persentase ketersediaan pangan 70,13 %, ketersediaan energi (kkal/kap/hri) 60 %, ketersediaan protein (gr/kap/hari) 80,66 %, Nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) 98,64 %.

Dalam mendukung capaian kinerja utama, pada tahun 2022 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu telah melaksanakan 12 program, yang terdiri dari Program Teknis Bidang sebagai program **urusan** dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sifatnya **non urusan/supporting**. Terhadap program yang terkait dengan **urusan** dapat uraikan sebagai berikut :



Tabel 2.1.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu s/d Tahun 2022**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	8 = (7/6)	9=(6+7)	10=(9/4)		
		<i>Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu</i>											
		<i>Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu</i>											
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												
01 2 01	- Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi											
01 2 01 01	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5	Dok	0	1	Dok	1	Dok	100%	2	Dok	40%
01 2 01 02	- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	5	Dok	0	1	Dok	1	Dok	100%	2	Dok	40%
01 2 01 03	- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	5	Dok	0	1	Dok	1	Dok	100%	2	Dok	40%
01 2 01 06	- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan OPD	80	Dok	0	16	Dok	16	Dok	100%	32	Dok	40%
01 2 02	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
01 2 02 01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	645	orang	0	129	orang	129	orang	100%	258	orang	40%
01 2 02 05	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	0	1	Laporan	1	Laporan	100%	2	Laporan	40%
01 2 05	- Administrasi Umum Perangkat Daerah												
01 2 05 01	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik / penerangan bangunan kantor	75	buah	0	11	buah	11	buah	100%	22	buah	29%
01 2 05 02	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	50	unit	0	8	unit	8	unit	100%	16	unit	32%
01 2 05 04	- Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Pengadaan bahan logistik kantor	20	Pkt	0	4	Pkt	4	Pkt	100%	8	Pkt	40%



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	9=(6+7)	10=(9/4)
01 2 05 05	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	20 Pkt	0	4 Pkt	4 Pkt	100%	8 Pkt	40%
01 2 05 06	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1200 Exp	0	240 Exp	240 Exp	100%	480 Exp	40%
01 2 05 08	- Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah paket pengadaan makanan dan minuman untuk tamu	3300 Org	0	330 Org	330 Org	100%	660 Org	20%
01 2 05 09	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	215 Laporan	0	43 Laporan	43 Laporan	100%	86 Laporan	40%
01 2 07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah								
01 2 07 05	- Pengadaan meubel	Jumlah Meubel yang disediakan	50 unit	0	22 unit	22 unit	100%	44 unit	88%
01 2 08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah								
01 2 08 02	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa listrik, air dan internet	60 Bulan	0	12 Bulan	12 Bulan	100%	24 Bulan	40%
01 2 08 04	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 Bulan	0	12 Bulan	12 Bulan	100%	24 Bulan	40%
01 2 09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah								
01 2 09 01	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	310 Unit	0	62 Unit	62 Unit	100%	124 Unit	40%
01 2 09 02	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional lapangan	210 Unit	0	42 Unit	41 Unit	97,62%	82 Unit	39%
01 2 09 06	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Penyediaan Jasa pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	200 Unit	0	53 Unit	53 Unit	100%	106 Unit	53%
01 2 09 10	- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Penyediaan Jasa pemeliharaan gedung kantor dan prasarana pendukung bangunan lainnya	20 Paket	0	4 Paket	4 Paket	100%	8 Paket	40%
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3 25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (ton)	1.333,41		1.184,72	1.989,55	167,93%	1.220,26	92%
03	Program pengelolaan perikanan tangkap								
03 2 01	Pengelolaan Penangkapan ikan di wilayah sungai, dabau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota								
03 2 01 02	- Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	Jumlah alat tangkap ikan yang diadakan	300 unit	0	100 unit	68 unit	68%	136 unit	45%
04	Program pengelolaan perikanan Budidaya								
04 2 04	Pengelolaan Pembudidayaan ikan								
04 2 04 02	- Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah kelompok yang mendapat bantuan prasarana pembudidayaan ikan	100 Klp	0	19 Klp	19 Klp	100%	38 Klp	38%



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	9=(6+7)	10=(9/4)
04 2 04 03	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Operasional UPTD Pembenihan Ikan	15 Keg	0	3 Keg	3 Keg	100%	6 Keg	40%
06	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan								
06 2 03	<i>Penyediaan dan Penyaluran bahan baku</i> - <i>industry pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota</i>								
06 2 03 02	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ kota	Jumlah kelompok yang mendapat bantuan fasilitas usaha perikanan skala mikro	20 Kip	0	4 Kip	4 Kip	100%	8 Kip	40%
3 27	PERTANIAN	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB Kota Palu (%)	4,50		4,10	3,95	96,34%	4,20	93,33%
		Produktivitas pertanian per hektar per tahun (ton/ha)	5,80		5,57	4,57	82,05%	5,67	97,76%
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-10		-10	-16,69	166,90%	-10	100%
02	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian								
02 2 02	<i>Pengelolaan sumber daya genetic (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota</i>								
02 2 02 01	- Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan /Tanaman	Operasional UPTD Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	60 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100%	24 bulan	40%
02 2 02 02	- Peningkatan kualitas SDG hewan/ tanaman	Operasional UPTD Penerapan Teknologi Pertanian	60 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100%	24 bulan	40%
02 2 02 03	- Pemanfaatan SDG hewan/ tanaman	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan usaha Tanaman Hortikultura	50 Kip	0	6 Kip	6 Kip	100%	12 Kip	24%
02 2 06	<i>Penyediaan bibit/bibit ternak dan hijauan</i> - <i>pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota</i>								
02 2 06 01	Pengadaan benih/ bibit ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi benih / bibit ternak / HMT	50 Kip	0	11 Kip	11 Kip	100%	22 Kip	44%
03	Program penyediaan dan pengembangan perasarana pertanian								
03 2 01	- <i>Pengembangan prasarana pertanian</i>								
03 2 01 01	Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B Kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B	Jumlah kelompok pangan yang mendapat fasilitasi Sarana Produksi	100 Kip	0	19 Kip	19 Kip	100%	38 Kip	38%



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	9=(6+7)	10=(9/4)
03 2 01 04	Penyusun master plan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan	Jumlah kelompok petani yang memperoleh sarana prasarana komoditas perkebunan	15 Kip	0	2 Kip	2 Kip	100%	4 Kip	27%
04	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner								
04 2 01	<i>Penjaminan kesehatan hewan, penuntun dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota</i>								
04 2 01 01	- Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Jumlah hewan yang mendapat pelayanan kesehatan hewan	6000 ekor		1200 ekor	1200 ekor	100%	2400 ekor	40%
04 2 04	- Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner								
04 2 04 01	- Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	Operasional UPTD Rumah Potong Hewan Kota Palu	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	24 bulan	40%
06	Program Perizinan Usaha Pertanian								
06 2 01	- Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota								
06 2 01 03	- Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Jumlah Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian, sub sektor peternakan	10 Keg		2 Keg	2 Keg	100%	4 Keg	40%
07	Program Penyuluhan Pertanian								
07 2 01	- Pelaksanaan penyuluhan pertanian								
07 2 01 01	- Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Jumlah penyuluh yang mendapat fasilitas peningkatan kapasitas kelembagaan	295 Org		59 Org	59 Org	100%	118 Org	40%
07 2 01 02	- Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah petani yang mendapat fasilitas pengembangan kelembagaan petani	2100 Org		410 Org	410 Org	100%	820 Org	39%
07 2 01 03	- Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Jumlah penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	115 Keg		23 Keg	23 Keg	100%	45 Keg	40%
2 09	PANGAN	<i>Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)</i>	150		150	105,19	70,13%	150	100%
		<i>Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hari)</i>	3.100		3.100	1860	60,00%	3100	100%
		<i>Ketersediaan protein (Gram/ Kap/ Hari)</i>	72,90		72,90	58,80	80,66%	72,90	100%
		<i>Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)</i>	83,87		81,41	80,3	98,64%	82,22	98%
03	Program Peningkatan diserifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Cakupan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan							
03 2 01	- Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan								



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	9=(6+7)	10=(9/4)
03 2 01 01	- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Data Informasi Harga dan Neraca Bahan Pangan	60 Dok		12 Dok	12 Dok	100%	24 Dok	40%
03 2 01 04	- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Data Stok, Pasokan dan Harga Pangan	60 Dok		12 Dok	12 Dok	100%	24 Dok	40%
03 2 04	Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi								
03 2 04 01	- Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5 Keg		1 Keg	1 Keg	100%	2 Keg	40%
03 2 04 02	- Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelo mpok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	50 Klp		12 Klp	12 Klp	100%	24 Klp	48%
04	Program Penanganan kerawanan pangan								
04 2 02	Penanangan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota								
04 2 02 02	- Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupten kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100000 Kg		40000 Kg	23600 Kg	59%	47200 Kg	47%
05	Program pengawasan keamanan pangan								
05 2 01	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota								
05 2 01 05	- Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan penanganan keamanan pangan dalam satu tahun	20 Kali		4 Kali	4 Kali	100%	8 Kali	40%



Tabel 2.2
Rekapitulasi Realisasi Keuangan Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian Program & Kegiatan	Target 2022	Realisasi 2022	
			Keuangan Rp	%
1	2	3	4	5
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat			
2.09.03.2.01	<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>			
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	37.757.000	33.700.000	89,25
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	16.896.175	16.404.175	97,09
2.09.03.2.04	<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>			
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	138.145.500	78.944.555	57,15
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	540.000.000	505.800.000	93,67
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan			
2.09.04.2.01	<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			
2.09.04.2.01.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	220.842.860	205.396.880	93,01
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan			
2.09.05.2.01	<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>			
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	17.705.200	14.104.500	79,66



3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			
3.25.03.2.01	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota</i>			
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	2.325.275.850	324.676.000	97,77
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			
3.25.04.2.04	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>			
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	901.415.900	824.260.280	91,44
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	49.026.850	48.754.150	99,44
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			
3.25.06.2.03	<i>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>			
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	153.953.150	51.622.850	33,53
3.27.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.291.400	1.291.400	100
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.151.400	42.832.400	97,01
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.585.630	72.585.630	100
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.759.500	14.759.500	100
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.120.000	3.120.000	100
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.025.000	14.025.000	100
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	371.035.000	370.832.353	99,95
3.27.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.000.000	174.371.213	98,51
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.657.329.710	1.602.886.416	96,71



3.27.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjangn Urusan Pemerintahan Daerah</i>			
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	590.700.000	590.700.000	100
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	90.300.000	78.541.800	86,98
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.100.000	7.100.000	100
3.27.01.2.09.11	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	171.900.000	171.326.000	99,67
3.27.02	<i>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</i>			
3.27.02.2.02	<i>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	62.217.980	54.054.080	86,88
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	66.040.050	63.126.950	95,59
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.019.593.890	674.955.810	66,20
3.27.02.2.06	<i>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</i>			
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	496.855.650	457.204.280	92,02
3.27.03	<i>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</i>			
3.27.03.2.01	<i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i>			
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	680.539.375	472.826.250	63,48
3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	21.188.500	20.862.500	98,46



3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
3.27.04.2.01	<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	132.963.000	132.363.000	99,55
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	254.521.660	252.760.660	99,31
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian			
3.27.06.2.01	<i>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	24.470.460	24.194.760	98,87
0.27.07	Program Penyuluhan Pertanian			
0.27.07.2.01	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>			
0.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	158.143.075	138.059.075	87,30
0.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	172.533.150	170.533.150	98,84
0.27.07.02.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	79.822.650	79.822.650	100
TOTAL ANGGARAN		22.392.331.325	20.896.513.655	93,32

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Pencapaian kinerja pelayanan dapat di ukur berdasarkan indikator yang telah di tetapkan di dalam Renstra. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu dapat di lihat pada tabel 2.3 (terlampir).



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PERANGKAT DAERAH				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	7	8	8	10	11	12	12	13
I	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			BB	BB	A	A	C	BB	A	A	Tahun 2023 menjadi IKU Esselon III
-	Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu			CC	B	BB	BB	BB	B	BB	BB	Tahun 2023 menjadi IKU Esselon III
II	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB (%)			4,10	4,20	4,30	4,40	3,95	4,20	4,30	4,40	IKU Esselon II
-	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (ton/ha)			5,57	5,63	5,68	5,74	4,57	5,63	5,68	5,74	Tahun 2023 menjadi IKU Esselon III
-	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular			-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-16,69	-10,00	-10,00	-10,00	Tahun 2023 menjadi IKU Esselon III
-	Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (ton)			1.184,72	1.220,26	1.256,87	1.294,57	1.989,55	1.220,26	1.256,87	1.294,57	Tahun 2023 menjadi IKU Esselon III
III	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)			150	150	150	150	105,19	150	150	150	IKU Esselon II
-	Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hari)			3.100	3.100	3.100	3.100	1.860	3.100	3.100	3.100	Tahun 2023 menjadi IKU Esselon III
-	Ketersediaan protein (Gram/ Kap/ Hari)			72,90	72,90	72,90	72,90	58,80	72,90	72,90	72,90	Tahun 2023 menjadi IKU Esselon III
-	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)			81,41	82,22	83,04	83,87	80,30	82,22	83,04	83,87	IKU Esselon II



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jajaran Pemerintahan Daerah Kota Palu yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan. OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu perlu melakukan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan, penyusunan rencana dan program, pengumpulan dan pengolahan data, pengelolaan perizinan dan pelayanan pada bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu (DPKP) dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kota Palu No. 10 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana di atur dalam Peraturan Walikota Palu No. 15 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. DPKP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu mempunyai fungsi :

- a) Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dan kebijakan di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang diberikan kepala daerah.
- b) Penyusunan rencana pembangunan, pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian dan ketahanan pangan.
- c) Penyusunan hasil pemantauan, laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah



- d) Penyusunan standar pembibitan yang menjadi kewenangan daerah
- e) Penyusunan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah.
- f) Penyusunan program Diklat SDM/aparat pertanian dan ketahanan pangan yang meliputi teknis fungsional, keterampilan dan kejuruan.
- g) Melakukan pembinaan, pengawasan dan perijinan serta pembinaan usaha pertanian dan ketahanan pangan.
- h) Melakukan pengkajian dan penerapan teknologi pertanian dan ketahanan pangan
- i) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas.
- j) Menyelenggarakan usaha pengelolaan di bidang pertanian dan ketahanan pangan
- k) Pengelolaan unit pelaksana Teknis Dinas

Dalam penyelenggaraan kewenangan tersebut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan
4. Pelaksanaan administrasi bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan



5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Melalui analisis lingkungan internal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, dapat dilihat apa kekuatan dan bagaimana kelemahan dalam sebuah organisasi, sehingga dengan melakukan analisis internal akan membantu suatu lembaga agar dapat mengoptimalkan kekuatan yang ada dan meminimalkan kelemahannya. Kekuatan dan kelemahan tersebut dapat dijadikan alat untuk meraih peluang serta menghindari ancaman.

Disamping itu untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, juga dikembangkan strategi yang spesifik sesuai dengan kondisi lokal. Untuk mengembangkan strategi pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan karakter wilayah kota Palu, maka diperlukan analisis aspek-aspek manajemen pembangunan dengan pendekatan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Treats*). Melalui analisis ini dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari faktor – faktor internal serta peluang dan ancaman dari faktor – faktor eksternal terhadap pembangunan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai berikut :

1. Kekuatan.

Sebagai identifikasi kekuatan (strenght), pada dasarnya merupakan suatu pengenalan terhadap lingkungan internal. Kekuatan yang dapat diidentifikasi adalah :

- Ketersediaan Sumberdaya manusia yang memadai
- Kelembagaan institusi pertanian yang makin lengkap (UPTD2 yang terintegrasi)
- Dukungan kebijakan dan regulasi daerah dan nasional
- Infrastruktur pertanian tersedia lebih baik



2. Kelemahan

Seperti fungsi kekuatan (strength), kelemahan pun (weakness) merupakan suatu pengenalan terhadap lingkungan internal organisasi, sehingga kelemahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan. (Indikasi ini dijumpai pada hal-hal sebagai berikut : (i) kapabilitas pelaksana tugas belum memadai; penugasan tidak sesuai dengan keahlian utama; beberapa tenaga khusus yang dibutuhkan belum tersedia).
- Peran dan fungsi UPT belum optimal. Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada Tupoksi serta sinergitas Tupoksi antar bidang dan UPT belum terjalin dengan baik.
- Belum optimalnya penguasaan informasi pasar pada beberapa sub sektor.
- Belum konsistennya data statistik pertanian
- Peran dan fungsi kelembagaan petani belum optimal
- Sarana dan prasarana belum memadai
- Terbatasnya alokasi anggaran
- Belum optimalnya sistem pengendalian internal

Analisis lingkungan eksternal digunakan untuk menginventarisasi adanya peluang dan tantangan / ancaman yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu didasarkan pada :

- Faktor eksternal
- Faktor yang sangat kritis dalam mendukung atau menghambat perkembangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.



- Kebijakan yang dapat mempengaruhi dan sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.

3. Peluang (Opportunities)

Peluang yang dimiliki Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu antara lain :

- Pasar produksi pertanian dan perikanan masih terbuka luas
- Potensi lingkungan cukup baik untuk meningkatkan produktivitas
- Cukup tersedia tenaga kerja dan relatif lebih murah
- Sumberdaya genetik lokal cukup tersedia
- Lahan-lahan tidur dan tidak dimanfaatkan masih cukup luas.
- Berkembangnya industri hasil pengolahan hasil pertanian
- Akses kerjasama dengan berbagai lembaga terbuka luas.
- Palu sebagai pusat perdagangan hasil-hasil pertanian dan kehutanan Sulawesi Tengah.

4. Tantangan (Threats)

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu antara lain :

- Penguasaan teknologi pertanian (hulu dan hilir) oleh masyarakat petani masih minim.
- Luas areal pengembangan pertanian terbatas, alih fungsi lahan berlangsung cepat, nilai lahan makin mahal, luas lahan kritis terus bertambah.
- Banyaknya produk-produk dari luar yang menyaingi pasar lokal.
- Sistem pertanian yang dijalankan petani belum ramah lingkungan.



- Menurunnya minat masyarakat terhadap usaha tani dan beralih ke usaha pertambangan.
- Meluasnya areal yang potensial terkena gangguan bencana alam /kerusakan lingkungan.
- Kemampuan permodalan petani terbatas, akses petani ke sumber permodalan rendah.
- Ketersediaan benih tanaman pangan dan hortikultura terbatas.
- Anomali Iklim.

Isu-isu strategis yang berkenaan dengan tugas dan fungsi OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu adalah sebagai berikut :

- 1) **Alih Fungsi Lahan Pertanian** Kota Palu, disadari bahwa Kota Palu merupakan ibu kota Provinsi dimana alih fungsi penggunaan lahan dari lahan pertanian ke peruntukan lainnya tidak bisa dihindarkan, sehingga diperlukan langkah antisipasi perlindungan lahan pertanian produktif serta pola pertanian yang mengarah pada pertanian perkotaan.
- 2) **Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk**, Jumlah penduduk Kota Palu Tahun 2020 tercatat sebanyak 373.218 jiwa (BPS Tahun 2021). Dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 371.365 jiwa, dengan laju pertumbuhan 0,49 %. Kondisi ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kota Palu khususnya dalam upaya menjamin ketersediaan bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan penduduknya, sementara sumber daya lahan pertanian sebagai "*pabrik*" bahan pangan luasnya relatif tetap bahkan cenderung terus berkurang sebagai akibat tekanan pemukiman penduduk dan perkembangan pembangunan di sektor lainnya.



- 3) **Kemiskinan**, dari jumlah sebanyak 373.218 jiwa penduduk di Kota Palu pada Tahun 2020, 26.890 Jiwa atau (6,8 %) di antaranya adalah Penduduk Miskin. Sebagian besar Petani Nelayan berada di kategori miskin.
- 4) **Ketahanan Pangan**, Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Kinerja masing masing sub sistem tercermin dalam hal stabilitas pasokan pangan, akses masyarakat terhadap pangan, serta pemanfaatan pangan, termasuk pengaturan menu dan distribusi pangan dalam keluarga. Kinerja dari ketiga subsistem ketahanan pangan akan terlihat pada status gizi masyarakat, yang dapat dideteksi antara lain dari status gizi anak balita. Apabila salah satu atau lebih dari ketiga subsistem tidak berfungsi maka akan terjadi masalah kerawanan pangan yang akan berdampak pada peningkatan status gizi kurang/gizi buruk. Jika terjadi hal demikian dapat dikatakan negara/daerah tersebut belum mampu mewujudkan ketahanan pangan. Permasalahan Gizi dapat pula dipengaruhi oleh perubahan pada gaya hidup terutama pola makan.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKP

Review terhadap rancangan awal RKP Tahun 2024 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu dapat dilihat pada tabel 2.4. (terlampir).



Tabel 2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
A	BIDANG PANGAN					BIDANG PANGAN					
1	Program Peningkatan diserifikasi dan ketahanan pangan masyarakat					Program Peningkatan diserifikasi dan ketahanan pangan masyarakat					
	<i>Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan</i>					<i>Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan</i>					
	- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Palu	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12 Laporan	335.509.200	- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Palu	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12 Laporan	16.764.250	
	- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Palu	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12 Laporan	16.764.250	- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Palu	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12 Laporan	136.509.200	Satgas Pangan
						- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Palu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	100 Keluarga	64.381.000	Baru
						- Pengediaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota					
						- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	25 Ton	240.000.000	baru
	<i>Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi</i>					<i>Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi</i>					
	- Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita per tahun	Palu	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 dokumen	50.066.000	- Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita per tahun	Palu	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 dokumen		
	- Pemberdayaan masyarakat dalam pengeneragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Palu	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengeneragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	12 laporan	64.381.000	- pemberdayaan masyarakat dalam pengeneragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Palu	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengeneragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	2 laporan	50.066.000	
2	Program Penanganan kerawanan pangan					Program Penanganan kerawanan pangan					
	<i>Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota</i>					<i>Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota</i>					
	- Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupten kota	Palu	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	124.823.542	- Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupten kota	Palu	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	124.823.542	
3	Program pengawasan keamanan pangan					Program pengawasan keamanan pangan					
	<i>Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota</i>					<i>Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota</i>					
	- Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	17.705.200	- Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	34.851.000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
A	BIDANGKELAUTAN DAN PERIKANAN					BIDANGKELAUTAN DAN PERIKANAN					
1	Program pengelolaan perikanan tangkap					Program pengelolan perikanan tangkap					
	- <i>Pengelolaan Penangkapan ikan di wilayah sungai, dabau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang</i>					- <i>Pengelolaan Penangkapan ikan di wilayah sungai, dabau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang</i>					
	- Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	Palu	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	100 unit	2.260.729.848	- Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	Palu	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	100 unit	2.465.320.000	
2	Program pengelolaan perikanan Budidaya					Program pengelolan perikanan Budidaya					
	- <i>Pengelolaan Pembudidayaan ikan</i>					- <i>Pengelolaan Pembudidayaan ikan</i>					
	- Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Palu	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	19 unit	561.180.750	- Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Palu	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 unit	561.180.750	
	- Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Palu	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 unit	49.026.850	- Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Palu	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	75.000.000	
3	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan					Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan					
	- <i>Penyediaan dan Penyaluran bahan baku industry pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota</i>					- <i>Penyediaan dan Penyaluran bahan baku industry pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota</i>					
	- Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ kota	Palu	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	4 pelaku usaha	153.953.150	- Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ kota	Palu	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	4 pelaku usaha	153.953.150	
B	BIDANG PERTANIAN					BIDANG PERTANIAN					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					
	- <i>Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>					- <i>Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>					
	- Penyusun dokumen perencanaan perangkat daerah	Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.634.239	- Penyusun dokumen perencanaan perangkat daerah	Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.570.700	
	- Koordinasi dan penyusun dokumen RKA-SKPD	Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.736.860	- Koordinasi dan penyusun dokumen RKA-SKPD	Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.515.000	
	- Koordinasi dan penyusun dokumen perubahan RKA-SKPD	Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.152.543	- Koordinasi dan penyusun dokumen perubahan RKA-SKPD	Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.214.000	
	- Koordinasi dan penyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	1.110.395	- Koordinasi dan penyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	16 Laporan	12.350.000	
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang/bulan	11.269.979.407	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129 orang/bulan	11.269.979.407	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 laporan	1.406.298	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 laporan	4.050.000	
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah					- Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1.765.500	- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1.765.500	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	340.284.555	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	96.217.300	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Penyediaan bahan logistic kantor	Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	72.585.630	- Penyediaan bahan logistic kantor	Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	76.614.200	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Palu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	10.500.800	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Palu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	10.500.800	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan-perundang-undangan	Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	3.600.000	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan-perundang-undangan	Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	3.600.000	
	- Fasilitas kunjungan tamu	Palu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	5.500.000	- Fasilitas kunjungan tamu	Palu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	15.300.000	
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	371.035.000	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	419.354.000	
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					
	- Pengadaan meubel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	5.552.100	- Pengadaan meubel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	15.552.100	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah					Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah					
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	209.000.000	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	209.000.000	
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 laporan	1.326.264.500	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 laporan	1.692.240.500	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60 Unit	565.200.000	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60 Unit	565.200.000	
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	42 Unit	78.800.000	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Palu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	42 Unit	78.800.000	
	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53 Unit	24.200.000	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53 Unit	24.200.000	
	- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.400.000	- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	56.400.000	
2	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian					Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian					
	Pengelolaan sumber daya genetic (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota					Pengelolaan sumber daya genetic (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota					
	- Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman	Palu	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	2 VUB	57.132.070	- Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman	Palu	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	2 VUB	57.132.070	
	- Peningkatan kualitas SDG hewan/ tanaman	Palu	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	66.040.050	- Peningkatan kualitas SDG hewan/ tanaman	Palu	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	66.040.050	
	- Pemanfaatan SDG hewan/ tanaman	Palu	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	4 dokumen	818.589.000	- Pemanfaatan SDG hewan/ tanaman	Palu	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	4 dokumen	818.589.000	
	Penyediaan bibit/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota					Penyediaan bibit/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota					
	- Pengadaan benih/ bibit ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain	Palu	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	100 Ekor	496.855.650	- Pengadaan benih/ bibit ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain	Palu	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	100 Ekor	496.855.650	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	<p>Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan prasarana pertanian - Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B Kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/ LCP2B - Penyusun master plan pengembangan prasarana, sarana, Kawasan dan komoditas perkebunan 	Palu	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	4 dokumen	680.539.375	<p>Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan prasarana pertanian - Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B Kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/ LCP2B - Penyusun masterplan pengembangan prasarana, sarana, Kawasan dan komoditas perkebunan 	Palu	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	4 dokumen	680.539.375	
4	<p>Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Penjaminan kesehatan hewan, penuntun dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota</i> - Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis - Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner - Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan 	Palu	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 laporan	151.492.450	<p>Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Penjaminan kesehatan hewan, penuntun dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota</i> - Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis - Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner - Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan 	Palu	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 laporan	151.492.450	Dak NF
5	<p>Program Perizinan Usaha Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota - Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian 	Palu	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	3 laporan	216.061.080	<p>Program Perizinan Usaha Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota - Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian 	Palu	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	3 laporan	216.061.080	
6	<p>Program Penyuluhan Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan penyuluhan pertanian - Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa - Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa - Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian 	Palu	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	2 laporan	22.791.900	<p>Program Penyuluhan Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan penyuluhan pertanian - Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa - Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa - Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 	Palu	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	2 laporan	22.791.900	
		Palu	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	46 unit	132.826.100		Palu	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	46 unit	132.826.100	
		Palu	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 unit	172.533.150		Palu	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 unit	172.533.150	
		Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	47 unit	79.822.650		Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	47 unit	100.224.950	
		Palu					Palu	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	5 Unit	50.000.000	Dak NF
JUMLAH TOTAL PAGU						20.541.463.492				21.156.401.149	





2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Peran serta dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana kerja dilakukan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Rapat forum PD/Gabungan PD, serta kegiatan diskusi kelompok terfokus (FGD).

Pelaksanaan Musrenbang setiap tahunnya dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Palu dan diadakan di setiap kelurahan yang ada di kota Palu. Selain Musrenbang regular biasa, mulai tiga tahun terakhir dilaksanakan *Musrenbang Inklusif* untuk mengakomodir kebutuhan kelompok masyarakat yang kurang terakomodir pada musrenbang biasa. Musrenbang merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rencana pembangunan daerah khususnya Pertanian dan Ketahanan Pangan dan mengalokasikan kegiatan tersebut menurut prioritasnya. Musrenbang juga berfungsi untuk menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat. serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.



BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun kedepan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumberdaya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun kedepan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumberdaya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antar sector ekonomi dan antar wilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.



Agenda satu tahun pertama dalam Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024, juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, disamping melayani kebutuhan – kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar.

Sementara, agenda lima tahun selama Tahun 2020-2024 sendiri diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk didalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

3.1.2 Visi Misi Pembangunan Nasional

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;



3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan daerah, lebih optimalkan pada tahapan persiapan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan pelaporan rencana pembangunan daerah.

Untuk mencapai visi, misi dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005–2025, melalui tahapan dan skala prioritas pemerintah Kota terekam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) guna menjawab berbagai permasalahan yang hendak diselesaikan secara terencana, terpadu, bertahap dan berkelanjutan.

Ada pun tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan pentingnya permasalahan yang harus diselesaikan dengan tidak mengabaikan kompleksitas permasalahan lainnya. Fokus dan skala prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun seluruhnya tetap dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dari periode ke periode berikutnya dalam kerangka pencapaian visi, misi dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu.



Hal tersebut dilakukan hubungannya dengan berbagai keterbatasan sumberdaya pembangunan yang dimiliki Kota Palu, sehingga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tersebut perlu dilaksanakan melalui tahapan dan skala prioritas yang direncanakan yaitu :

RPJPD Kota Palu Tahap Ketiga Tahun 2015 – 2025

- Pada tahap ketiga ini diharapkan terjadinya Peningkatan kualitas Infrastruktur perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan publik, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.
- Sasaran pokok yang akan dicapai dalam tahap ketiga pembangunan jangka panjang Kota Palu yaitu: Meningkatnya kualitas Infrastruktur Perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan publik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.
- Indikator kinerja utamanya adalah: Tersedianya kawasan pusat industri, perdagangan, pariwisata, dan pelayanan publik yang berkualitas, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.
- Hasil yang diharapkan dicapai pada pembangunan tahap ketiga RPJPD Kota Palu, atau diakhir tahun RPJMD tahap ketiga adalah: Di masing-masing wilayah Kecamatan telah memiliki kawasan pusat perdagangan dan industri, pariwisata, serta segala fasilitas yang berkualitas untuk kemudahan pelayanan publik, dengan tidak mengabaikan persoalan lingkungan.
- Hal hal tersebut didukung oleh kondisi aman dan perdamaian yang makin mantap dan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi dan nondiskriminasi. Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam



berbagai aspek berkembang makin mantap serta makin meningkatnya profesionalisme aparatur dalam bingkai tata kelola pemerintahan yang baik.

- Kesejahteraan masyarakat terus membaik dan merata didukung oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik dengan indikator meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa.
- Daya saing perekonomian kota Palu semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya sektor perdagangan, pariwisata dan industri dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, IPTEK dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.
- Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang; terpenuhinya pasokan tenaga listrik hingga ke tingkat elektrifikasi rumah tangga; terwujudnya konservasi dan pengembangan sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pemenuhan kebutuhan pemukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat.



- Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap menuju kota ekologis dicerminkan oleh indikator terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan dan semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang serta meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat.

3.1.4 Visi dan Misi Wali Kota Palu periode 2021-2024

Adapun Visi Pemerintah Kota Palu adalah

**MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN DAN NYAMAN,
TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL
DAN KEAGAMAAN**

**Untuk mencapai visi tersebut maka Misi Pemerintah Kota Palu
adalah sebagai berikut :**

- 1) Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global.
- 2) Membangun kembali lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana.
- 3) Mengembangkan sumber daya manusia yang Tangguh menghadapi perkembangan global.
- 4) Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani.



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu tahun 2021 - 2026, maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan program dan kegiatan pada tahun 2024, sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang ingin dicapai pada tahun rencana untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.

Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan perikanan.
- Meningkatkan kuantitas, kualitas, mutu produk dan daya saing serta kontinuitas produk hasil pertanian dan perikanan.
- Memperluas pangsa pasar hasil dan produksi olahan hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan serta perikanan.
- Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam upaya peningkatan ketahanan pangan melalui subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi.
- Meningkatkan kualitas SDM Petugas, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta Kelembagaan dengan pelatihan dan pendampingan.



Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mendatang. Sasaran yang ingin dicapai dalam Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Periode Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan produksi, produktivitas hasil pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan peternakan), dan perikanan.
- Meningkatnya produksi produk hasil olahan pertanian dan perikanan
- Meningkatnya transaksi produk olahan pertanian dan perikanan
- Meningkatnya ketahanan masyarakat Kota Palu terhadap akses pangan mencakup aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.
- Meningkatnya cakupan layanan penyuluhan terhadap pelaku utama dan pelaku usaha pertanian dan perikanan.

3.3 Program dan Kegiatan

Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021	
Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.09	BIDANG PANGAN
2.09.03	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
2.09.03.2.01	<i>Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan</i>
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan



2.09.03.2.01.04	<i>Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan</i>
2.09.03.2.01.07	<i>Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</i>
2.09.03.2.02	<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten /Kota</i>
2.09.03.2.02.03	<i>Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>
2.09.03.2.04	<i>Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi</i>
2.09.03.2.04.01	<i>Penyusunan dan penetapan target konsumsi panganperkapita per tahun</i>
2.09.03.2.04.02	<i>Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal</i>
2.09.04	Program Penanganan kerawanan pangan
2.09.04 .0.02	<i>Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota</i>
2.09.04 .0.02.02	<i>Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupten kota</i>
2.09.05	Program pengawasan keamanan pangan
2.09.05.2.01	<i>Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota</i>
2.09.05.2.01.05	<i>Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota</i>
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.3.25	BIDANG KELAUTAN PERIKANAN
3.3.25.03	Program pengelolaan perikanan tangkap
3.3.25.03.2.01	<i>Pengelolaan Penangkapan ikan di wilayah sungai, dabau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota</i>
3.3.25.03.2.01.02	<i>Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap</i>
3.3.25.04	Program pengelolan perikanan Budidaya
3.3.25.04.2.04	<i>Pengelolaan Pembudidayaan ikan</i>
3.3.25.04.2.04.02	<i>Penyedian prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota</i>
3.3.25.04.2.04.03	<i>Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</i>



3.3.25.06	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
3.3.25.06.0.03	<i>Penyediaan dan Penyaluran bahan baku industry pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota</i>
<i>3.3.25.06.0.03.02</i>	<i>Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ kota</i>
3.27	BIDANG PERTANIAN
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3.27.01.2.01	<i>Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>
<i>3.27.01.2.01.01</i>	<i>Penyusun dokumen perencanaan perangkat daerah</i>
<i>3.27.01.2.01.02</i>	<i>Koordinasi dan penyusun dokumen RKA-SKPD</i>
<i>3.27.01.2.01.03</i>	<i>Koordinasi dan penyusun dokumen perubahan RKA-SKPD</i>
<i>3.27.01.2.01.06</i>	<i>Koordinasi dan penyusun laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>
3.27.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
<i>3.27.01.2.02.01</i>	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>
<i>3.27.01.2.02.05</i>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>
3.27.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
<i>3.27.01.2.06.01</i>	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor</i>
<i>3.27.01.2.06.02</i>	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>
<i>3.27.01.2.06.04</i>	<i>Penyediaan bahan logistic kantor</i>
<i>3.27.01.2.06.05</i>	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>
<i>3.27.01.2.06.06</i>	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan</i>
<i>3.27.01.2.06.08</i>	<i>Fasilitasi kunjungan tamu</i>
<i>3.27.01.2.06.09</i>	<i>Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>
3.27.01.2.07	<i>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>
<i>3.27.01.2.07.05</i>	<i>Pengadaan meubel</i>
3.27.01.2.08	<i>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>
<i>3.27.01.2.08.02</i>	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>
<i>3.27.01.2.08.04</i>	<i>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>



3.27.01.2.09	<i>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>
3.27.01.2.09.01	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</i>
3.27.01.2.09.02	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</i>
3.27.01.2.09.06	<i>Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>
3.27.01.2.09.11	<i>Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya</i>
3.27.02	<i>Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian</i>
3.27.02.2.02	<i>Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota</i>
3.27.02.2.02.01	<i>Penjaminan kualitas SDG hewan/ tanaman</i>
3.27.02.2.02.02	<i>Peningkatan kualitas SDG hewan/ tanaman</i>
3.27.02.2.02.03	<i>Pemanfaatan SDG hewan / tanaman</i>
3.27.02.2.06	<i>Penyediaan bibit/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupten/ kota</i>
3.27.02.2.06.01	<i>Pengadaan benih/ bibit ternah dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupetan/kota lain</i>
3.27.02.2.06.03	<i>Program penyediaan dan pengembangan perasarana pertanian</i>
3.27.02.2.01	<i>Pengembangan prasarana pertanian</i>
3.27.02.2.01.01	<i>Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B Kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/ LCP2B</i>
3.27.02.2.01.04	<i>Penyusun masterplan pengembangan prasarana, sarana, Kawasan dan komoditas perkebunan</i>
3.27.0.4	<i>Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</i>
3.27.0.4.2.01	<i>Penjaminan kesehatan hewan, penuntun dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota</i>
3.27.0.4.2.01.01	<i>Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis</i>
3.27.0.4.2.04	<i>Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner</i>
3.27.0.4.2.04.01	<i>Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan</i>



3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian
3.27.06.2.01	<i>Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota</i>
3.27.06.2.01.03	<i>Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian</i>
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian
3.27.07.2.01	<i>Pelaksanaan penyuluhan pertanian</i>
3.27.07.2.01.01	<i>Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa</i>
3.27.07.2.01.02	<i>Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa</i>
3.27.07.2.01.03	<i>Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian</i>
3.27.07.2.01.05	<i>Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota</i>

Untuk mengetahui rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1



Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
pada Tahun 2024 serta Prakiraan Maju Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
A	BIDANG PANGAN								
1	Program Peningkatan diserifikasi dan ketahanan pangan masyarakat								
	<i>Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan</i>								
	- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Palu	12 Laporan	16.764.250	APBD		12 Laporan	17.602.463
	- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Palu	12 Laporan	136.509.200	APBD	Satgas Pangan	12 Laporan	143.334.660
	- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		100 Kel.	64.381.000	APBD	Baru	100 Kel.	67.600.050
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota								
	- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		25 Ton	240.000.000	APBD	baru	25 Ton	252.000.000
	<i>Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi</i>								
	- Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Palu	1 dokumen				1 dokumen	
	- Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	Palu	2 laporan	50.066.000	APBD		2 laporan	52.569.300
2	Program Penanganan kerawanan pangan								
	<i>Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota</i>								
	- Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupten kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Palu	2 dokumen	124.823.542	APBD		2 dokumen	131.064.719



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	<p>Program pengawasan keamanan pangan</p> <p><i>Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota</i></p> <p>Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota</p>	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Palu	4 dokumen	34.851.000	APBD		4 dokumen	36.593.550
II URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
A BIDANGKELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	<p>Program pengelolaan perikanan tangkap</p> <p><i>Pengelolaan Penangkapan ikan di wilayah sungai, dabau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat</i></p> <p>- Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap</p>	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Palu	100 unit	2.465.320.000	APBD		100 unit	2.588.586.000
2	<p>Program pengelolaan perikanan Budidaya</p> <p><i>Pengelolaan Pembudidayaan ikan</i></p> <p>- Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota</p> <p>- Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota</p>	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Palu	15 unit	561.180.750	APBD		15 unit	589.239.788
		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Palu	1 unit	75.000.000	APBD		1 unit	78.750.000
3	<p>Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan</p> <p><i>Penyediaan dan Penyaluran bahan baku industry pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota</i></p> <p>- Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ kota</p>	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Palu	4 pelaku usaha	153.953.150	APBD		4 pelaku usaha	161.650.808
B BIDANG PERTANIAN									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
1	<p><i>Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i></p> <p>- Penyusun dokumen perencanaan perangkat daerah</p>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	1 Dokumen	6.570.700	APBD		1 Dokumen	6.899.235



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Koordinasi dan penyusun dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palu	1 Dokumen	7.515.000	APBD		1 Dokumen	7.890.750
	- Koordinasi dan penyusun dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palu	1 Dokumen	2.214.000	APBD		1 Dokumen	2.324.700
	- Koordinasi dan penyusun laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Palu	16 Laporan	12.350.000	APBD		16 Laporan	12.967.500
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palu	129 orang/bulan	11.269.979.407	APBD		129 orang/bulan	11.833.478.377
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Palu	1 laporan	4.050.000	APBD		1 laporan	4.252.500
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palu	1 paket	1.765.500	APBD		1 paket	1.853.775
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Palu	8 paket	96.217.300	APBD		8 paket	101.028.165
	- Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Palu	1 paket	76.614.200	APBD		1 paket	80.444.910
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Palu	1 paket	10.500.800	APBD		1 paket	11.025.840
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Palu	24 dokumen	3.600.000	APBD		24 dokumen	3.780.000
	- Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palu	1 laporan	15.300.000	APBD		1 laporan	16.065.000
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu	12 laporan	419.354.000	APBD		12 laporan	440.321.700
	- Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah								
	- Pengadaan meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 unit	15.552.100	APBD		1 unit	16.329.705
	- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah								
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palu	12 laporan	209.000.000	APBD		12 laporan	219.450.000
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Palu	12 laporan	1.692.240.500	APBD		12 laporan	1.776.852.525
	- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Palu	60 Unit	565.200.000	APBD		60 Unit	593.460.000
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Palu	42 Unit	78.800.000	APBD		42 Unit	82.740.000
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Palu	53 Unit	24.200.000	APBD		53 Unit	25.410.000
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya 	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palu	6 Unit	56.400.000	APBD	Pemeliharaan bangunan BPP Kecamatan	1 Unit	59.220.000
2	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian <i>Pengelolaan sumber daya genetic (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota</i> <ul style="list-style-type: none"> Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman Peningkatan kualitas SDG hewan/ tanaman Pemanfaatan SDG hewan/ tanaman 	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Palu	2 VUB	57.132.070	APBD		2 VUB	59.988.674
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas SDG hewan/ tanaman 	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Palu	1 Dokumen	66.040.050	APBD		1 Dokumen	69.342.053
	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan SDG hewan/ tanaman 	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Palu	4 dokumen	818.589.000	APBD		4 dokumen	859.518.450
	<i>Penyediaan bibit/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupten/ kota</i> <ul style="list-style-type: none"> Pengadaan benih/ bibit ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupetan/kota lain 	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Palu	100 Ekor	496.855.650	APBD		100 Ekor	521.698.433
3	Program penyediaan dan pengembangan perasarana pertanian <ul style="list-style-type: none"> <i>Pengembangan prasarana pertanian</i> 	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Palu	4 dokumen	680.539.375	APBD		4 dokumen	714.566.344
	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B Kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/ LCP2B 	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Palu	4 dokumen	680.539.375	APBD		4 dokumen	714.566.344



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	<ul style="list-style-type: none"> Penyusun masterplan pengembangan prasarana, sarana, Kawasan dan komoditas perkebunan 	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Palu	1 Dokumen	30.107.000	APBD		1 Dokumen	31.612.350
	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner <i>Penjaminan kesehatan hewan, penuntun dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota</i> <ul style="list-style-type: none"> Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis 	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Palu	1 laporan	151.492.450	APBD	Dak NF	1 laporan	159.067.073
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner</i> Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan 	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Palu	3 laporan	216.061.080	APBD		3 laporan	226.864.134
5	Program Perizinan Usaha Pertanian <i>Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota</i> <ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian 	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Palu	2 laporan	22.791.900	APBD		2 laporan	23.931.495
6	Program Penyuluhan Pertanian <ul style="list-style-type: none"> <i>Pelaksanaan penyuluhan pertanian</i> Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 	Palu	46 unit	158.143.075	APBD		46 unit	166.050.229
			Palu	50 unit	172.533.150	APBD		50 unit	181.159.808
			Palu	47 unit	100.224.950	APBD	Penambahan Sarana Penyuluhan	47 unit	105.236.198
				5 Unit	50.000.000	DAK-NF	Dak NF	5 Unit	52.500.000
JUMLAH TOTAL PAGU					21.156.401.149	-			22.214.221.206



BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu disusun berdasarkan hasil analisis dan masukan dari stakeholder proses perencanaan antara lain :

- Musrenbang (Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Palu).
- Musrenbang Inklusif.
- Penyusunan Program Penyuluhan (Kecamatan dan Tingkat Kota Palu).
- Hasil Reses anggota DPRD Kota Palu
- Sinkronisasi dengan program kegiatan Kementerian terkait.

Dari hasil analisis dan proses perencanaan yang telah dilaksanakan menghasilkan beberapa program kegiatan inovatif Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu yang sangat mendukung pencapaian Misi ke -1 Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global, dan Misi ke-4 Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani. Adapun program Inovatif Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan antara lain :

1. Pengembangan Pertanian Kota Palu Berbasis Agrowisata.
2. Pengembangan Ekonomi Pembudidaya ikan dan Masyarakat Pesisir Kota Palu.
3. Pemanfaatan Pekarangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan Kota Palu.
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia Petugas dan Pelaku Usaha Pertanian/Perikanan Kota Palu

Rekapitulasi Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.



1	2	3	4	5	6	7	8
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palu	1 Dokumen	7.515.000	APBD	
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palu	1 Dokumen	2.214.000	APBD	
	- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Palu	16 Laporan	12.350.000	APBD	
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palu	129 orang/bulan	11.269.979.407	APBD	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Palu	1 laporan	4.050.000	APBD	
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palu	1 paket	1.765.500	APBD	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Palu	8 paket	96.217.300	APBD	
	- Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Palu	1 paket	76.614.200	APBD	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Palu	1 paket	10.500.800	APBD	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Palu	24 dokumen	3.600.000	APBD	
	- Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Palu	1 laporan	15.300.000	APBD	
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palu	12 laporan	419.354.000	APBD	
	- Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						
	- Pengadaan meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 unit	15.552.100	APBD	
	- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah						
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palu	12 laporan	209.000.000	APBD	
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Palu	12 laporan	1.692.240.500	APBD	
	- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Palu	60 Unit	565.200.000	APBD	
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Palu	42 Unit	78.800.000	APBD	
	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Palu	53 Unit	24.200.000	APBD	
	- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palu	1 Unit	56.400.000	APBD	
2	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian						
	- Pengelolaan sumber daya genetic (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota						
	- Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Palu	2 VUB	57.132.070	APBD	
	- Peningkatan kualitas SDG hewan/ tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Palu	1 Dokumen	66.040.050	APBD	
	- Pemanfaatan SDG hewan/ tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Palu	4 dokumen	818.589.000	APBD	
	- Penyediaan bibit/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupten/ kota						
	- Pengadaan benih/ bibit ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Palu	100 Ekor	496.855.650	APBD	
3	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian						
	- Pengembangan prasarana pertanian						
	- Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B Kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/ LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Palu	4 dokumen	680.539.375	APBD	



Rencana Kerja (RENJA) 2024 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Palu

1	2	3	4	5	6	7	8
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusun masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan 	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Palu	1 Dokumen	30.107.000	APBD	
4	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner <i>Penjaminan kesehatan hewan, penuntun dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota</i> <ul style="list-style-type: none"> Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis 	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Palu	1 laporan	151.492.450	APBD	Dak NF
	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan 	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Palu	3 laporan	216.061.080	APBD	
5	Program Perizinan Usaha Pertanian <i>Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota</i> <ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian 	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Palu	2 laporan	22.791.900	APBD	
6	Program Penyuluhan Pertanian <i>Pelaksanaan penyuluhan pertanian</i> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Palu	46 unit	158.143.075	APBD	
			Palu	50 unit	172.533.150	APBD	
			Palu	47 unit	100.224.950	APBD	
				5 Unit	50.000.000	DAK-NF	Dak NF
JUMLAH TOTAL PAGU					21.156.401.149	-	



Rencana Kerja (RENJA) 2024 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Palu

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu tahun 2021-2026, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kota Palu serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2024.

Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran

Dengan adanya RENJA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kota Palu maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

